SINERGI PENYULUH ANTIKORUPSI DAN KPK DALAM PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

DIKYANMAS

Giri Suprapdiono
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK

IPAK Indonesia, 2020

IPAK Indonesia 2020 sebesar 3,84 dari skala 0 – 5. Angka ini lebih tinggi 0,14 poin dibandingkan dengan IPAK 2019 sebesar 3,70.

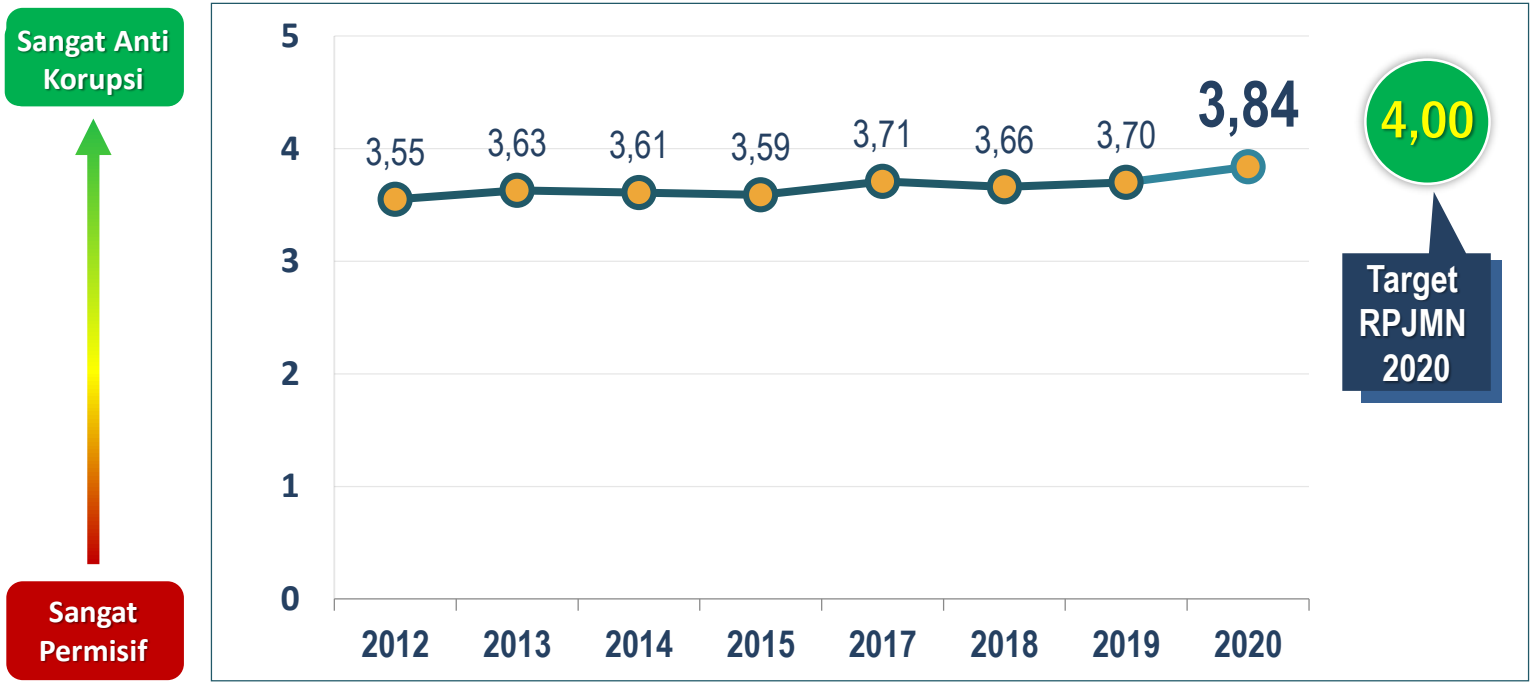

Makna Indeks

- ✓ Semakin mendekati 5, masyarakat cenderung semakin ANTI KORUPSI,
- ✓ Semakin mendekati 0, masyarakat cenderung semakin permisif terhadap korupsi.

Perkembangan IPAK Menurut Dimensi, 2012- 2020

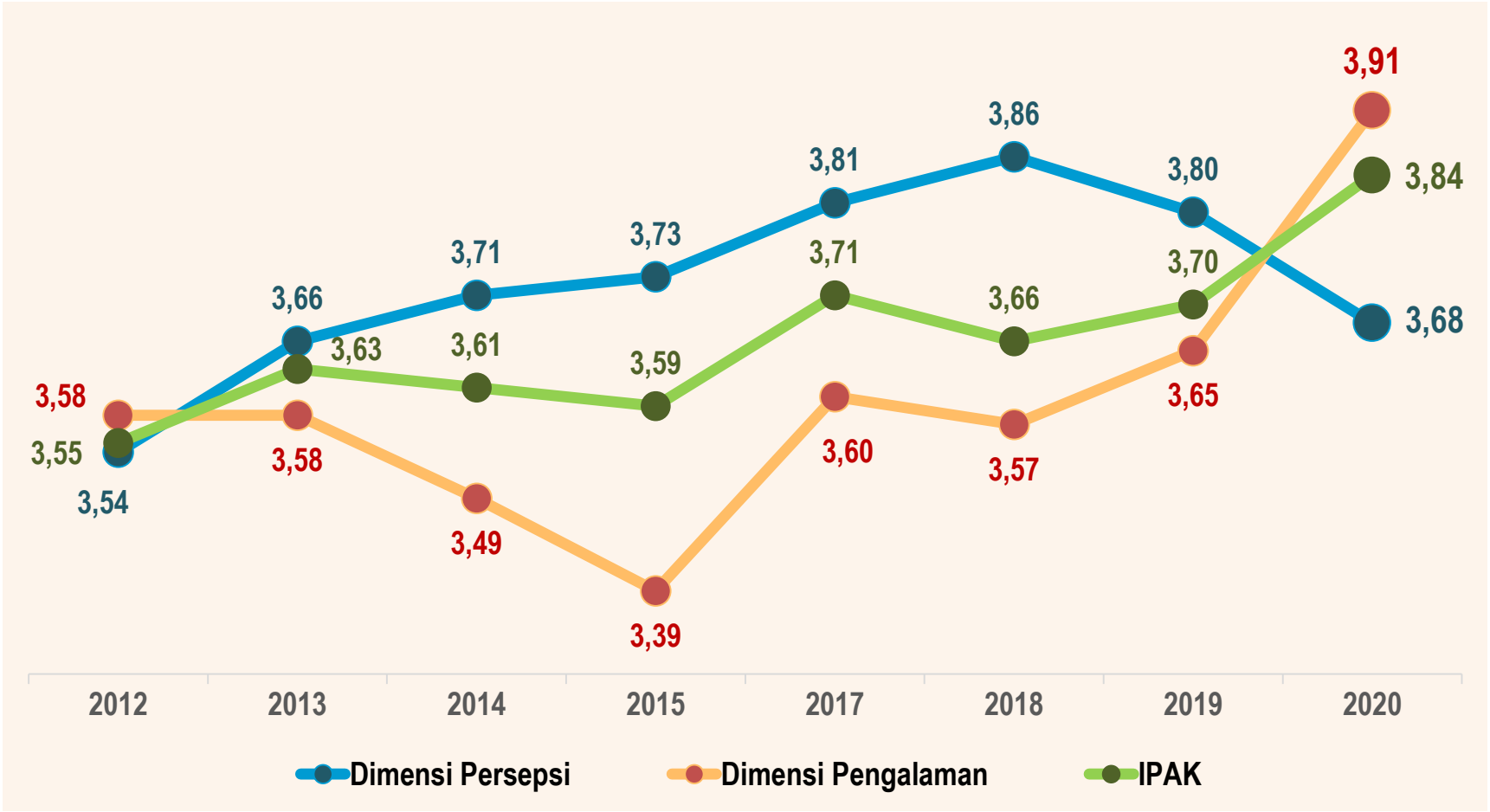

- ✓ Dari dimensi persepsi, menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap korupsi di tahun 2020
- ✓ Dimensi pengalaman cenderung fluktuatif, tetapi semakin anti korupsi di tahun 2020
- ✓ IPAK 2020 naik dibanding IPAK 2019

Perkembangan Masyarakat yang Menganggap Wajar Korupsi di Lingkup Publik, 2018- 2020

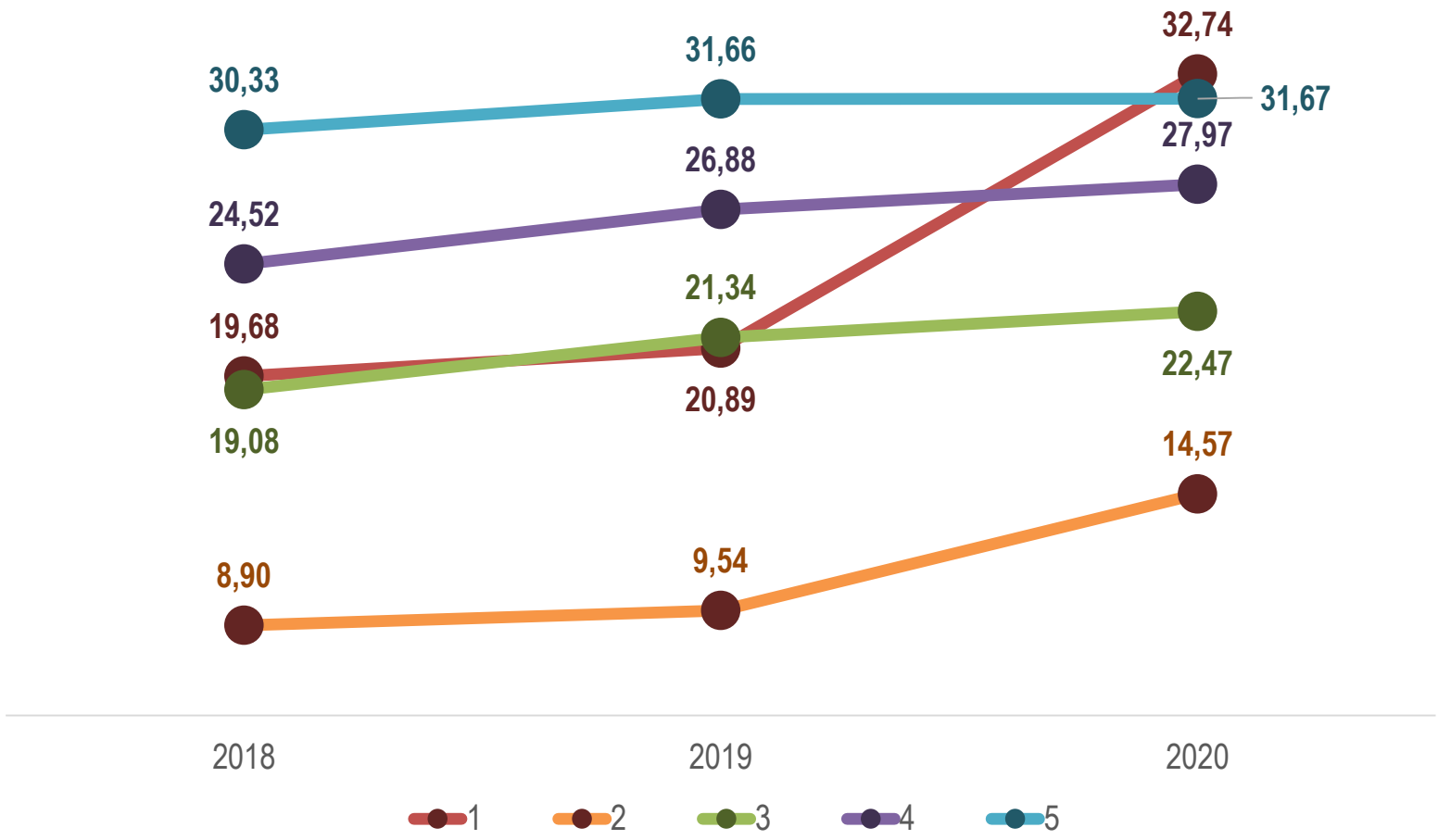

Keterangan:

1. Menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada PILKADES/PILKADA/PEMILU
2. Pihak sekolah (guru/kepala sekolah/komite sekolah) meminta uang/barang/fasilitas dari orang tua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor
3. Peserta PILKADES/PILKADA/PEMILU membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih
4. Memberi uang/barang/fasilitas untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll
5. Memberi uang/barang/fasilitas kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi kependudukan (KTP, KK, SKTM, dll)

- Pada lingkup publik juga menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap korupsi.
- Kenaikan persentase tertinggi adalah pada sikap menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada PILKADES/PILKADA/PEMILU

Persentase Pengalaman Masyarakat yang Mengakses Layanan Publik

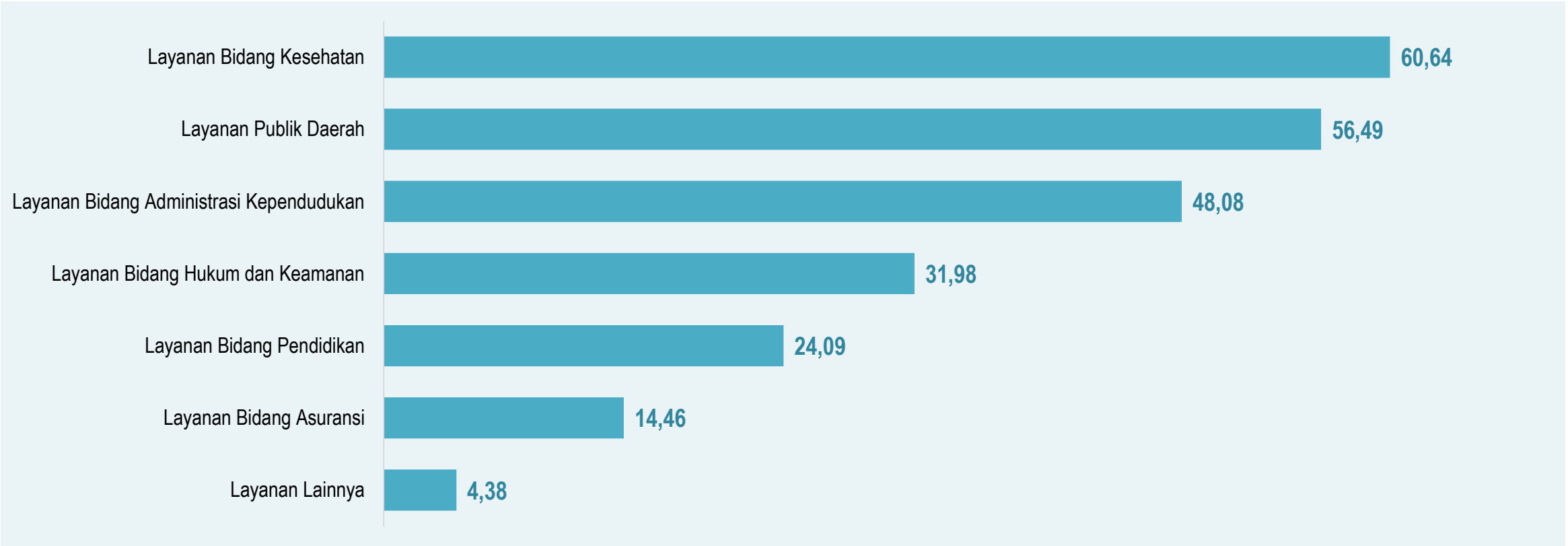

Pada tahun 2020 masyarakat paling banyak mengakses layanan publik di bidang kesehatan, yaitu sebesar 60,64 persen

Pengalaman Masyarakat Lainnya Selain Layanan Publik

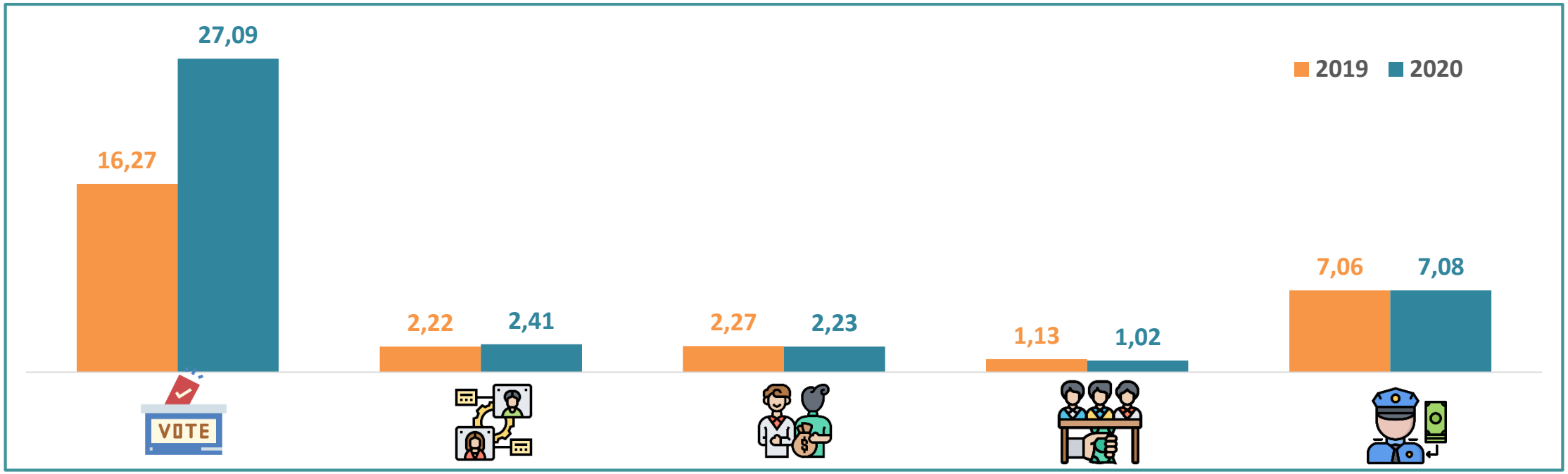

Pengalaman ditawari uang/barang/fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam PILKADES, PILKADA, atau PEMILU yang terakhir

Pengalaman ditawari oleh seseorang untuk memasukkan anggota rumah tangga agar diterima menjadi Aparatur Sipil Negara/pegawai swasta dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu

Pengalaman ditawari bantuan/jaminan diterima oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga menjadi Aparatur Sipil Negara/pegawai swasta

Pengalaman ditawari bantuan/jaminan diterima oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga lolos seleksi penerimaan sekolah

Pengalaman ditawari untuk membayar uang damai saat ditilang oleh petugas polisi lalu lintas

Komitmen Politik

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

WEWENANG PENCEGAHAN KPK

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU No 19 Tahun 2019

Menyelenggarakan program

PENDIDIKAN

Antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan program

SOSIALISASI

Pemberantasan tipikor

Melakukan

KAMPANYE

Antikorupsi kepada masyarakat

SATUAN TUGAS

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT KPK

1	2	3	4
DIKTI K/L	DIKDASMEN PEMDA	MASYARAKAT SIPIL & POLITIK	KAMPANYE

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUATAN INTEGRITAS MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 7 huruf C UU KPK:
"KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di setiap jejaring pendidikan."

Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Dasar | Pendidikan Menengah | Pendidikan Tinggi | Masyarakat Umum

Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan karakter yang berhubungan dengan penguatan nilai-nilai dalam diri seseorang. Disinilah "**nilai karakter pembentuk integritas**" menjadi kunci yang sangat penting.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

RAKORNAS

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 2018

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN :

1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan; dan
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik.

Jakarta, 11 Desember 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Agama

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Menteri Dalam Negeri

Pimpinan KPK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BERANI JUJUR! HEBAT!

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, SELAKU PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSAMA-SAMA BERKOMITMEN UNTUK :

1. Menyusun kebijakan yg mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 2019;
2. Menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jenjang Pendidikan;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;
4. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus / pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dan penerapan Tata Kelola Pendidikan yang bersih dan Baik;
7. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta penerapan Tata Kelola yang Bersih dan Baik di setiap jenjang Pendidikan;
8. Mendorong Tata Kelola Pendidikan Yang Bersih dan Baik melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan
9. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK.

Jakarta, 11 Desember 2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Pendekatan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

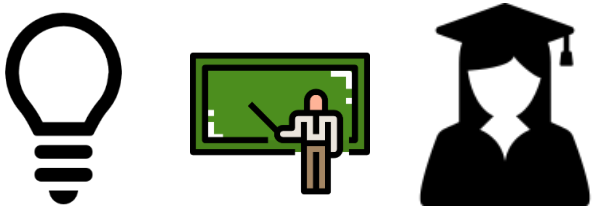

01

MAHASISWA BARU

Membangun kesadaran antikorupsi, melalui:
1. Kuliah Umum
2. Buku KPK: Workbook Orientasi Antikorupsi

02

MASA PERKULIAHAN

Meningkatkan pemahaman antikorupsi, melalui:
1. Pendidikan Antikorupsi dalam mata kuliah wajib, pilihan atau insersi;
2. KKN Antikorupsi;
3. Buku KPK: Modul Pendidikan Antikorupsi, Buku Panduan Dosen, Panduan Kampanye Integritas

03

MENJELANG KELULUSAN

Menanamkan pemahaman antikorupsi melalui:
1. Kuliah Umum (Saat Judicium, Dies Natalis, Wisuda)
2. Memberikan motivasi / tips antikorupsi kepada mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja
3. Buku KPK: Buku Saku Antikorupsi untuk lulusan

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kita Generasi Antikorupsi

Pendekatan Pendidikan Antikorupsi di Pendidikan Dasar & Menengah

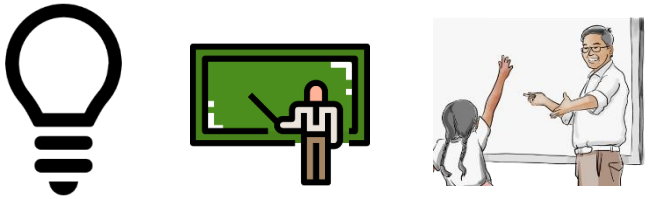

01

REGULASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Mendorong terbitnya regulasi implementasi Pendidikan Antikorupsi di seluruh Provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia, melalui:

1. Koordinasi Teknis dengan Pemerintah Daerah
2. Workshop Program PAK kepada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di daerah

02

TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, PESERTA DIDIK

Membangun kesadaran antikorupsi di lingkungan, melalui:

1. Insersi Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidiakn
2. Materi Pembelajaran KPK: Modul Pendidikan Antikorupsi, Buku Panduan Implementasi PAK, Materi audiovisual

03

DISEMINASI DAN SOSIALISASI

Menyebarluaskan Program PAK kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat di seluruh Indonesia melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait Pendidikan Antikorupsi, baik yang diselenggarakan oleh KPK maupun atas inisiatif stakeholder yang terkait dengan Pendidikan.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemenuhan Permintaan Narasumber terkait Pendidikan Antikorupsi

Untuk Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi

Proparpol

Program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi

Mengapa Pendidikan Anti Korupsi Politisi?

Aku *tidak ingin* korupsi.

Tahu dan memahami anti korupsi dan cara menghindarinya

Komunikasi simetris dan perlunya **sinergi** lembaga politik dan penegak hukum

Mampu memimpin diri sendiri (*self mastery*) bagi politikus untuk menjadi bagian perubahan

Strategi baru

Pendidikan

- Kampanye
- Sosialisasi
- Pendidikan

Pendidikan Antikorupsi Politik

Pencegahan

Kajian SIPP, pilkada langsung dan Revisi UU Parpol

(on progress)

Kajian Pendanaan Parpol oleh Negara

(50% dibiayai negara + kinerja SIPP)

Rp. 108/suara → Rp. 8.461/suara (2020). Realisasi: Rp.1000/suara

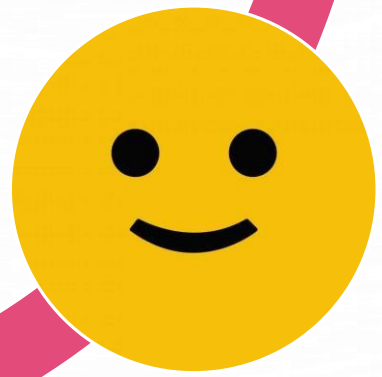

Kajian remunerasi pejabat strategis

(on progress)

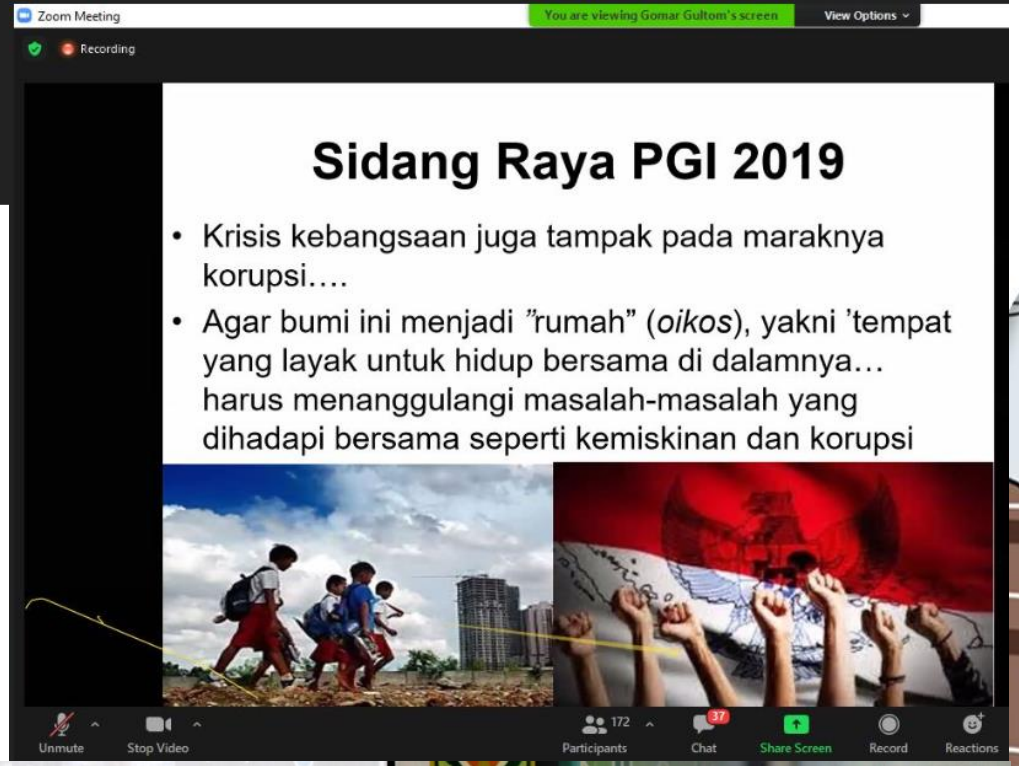

SEMUA AGAMA SEMUA GOLONGAN ANTIKORUPSI

Tolak Politik Uang

Haram!

Setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih atau pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji, maka orang tersebut dipidana 3-6 tahun plus denda.

*(Pasal 187A ayat 1&2 UU 10/2016 tentang Pilkada)

REALISASI PROGRAM TIM MASSIP (per Des 2019)

A. Sosialisasi & Konsolidasi Masyarakat Sipil

1 Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAK)

"Pemenuhan Narasumber KPK oleh PAK"

Narasumber Antikorupsi di KPPN Surakarta, 17 Juli 2019

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Narasumber
1	Bimtek Antikorupsi untuk Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Pekalongan	17 Januari 2019	Hotel Semarang	50	Drs. Kunto Nugroho, M.Si
2	Narasumber Kuliah Umum Antikorupsi dalam kegiatan Milad HMI Cabang Ciamis	6 Februari 2019	Ciamis	50	Reny Andriany, S.Pd., M.Pd,
3	Narasumber Penguatan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi	23 Maret 2019	KPPN Denpasar	75	Ni Ketut Ratmini
4	Seminar dalam rangka Dies Natalies ke-49 Akaderni Akuntansi YKPN Yogya	30 Maret 2019	Kampus YKPN Yogya	140	Sugiarto
5	Narasumber Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	26 Maret 2019	Pusdiklat Kopassus Batujajar	50	Ir. Dayat Nurhayat SW, M.Sc.
6	Narasumber pengenalan seputar gratifikasi dan korupsi di lingkungan Ikatan Istri Karyawan Jasindo (IIKJ)	5 Mei 2019	Auditorium Garuda Kantor Pusat PT. Asuransi Jasindo	100	Sugiarto
7	Narasumber Hala Bihalal Forum Komunikasi Pengawas Internal Jabar	5 Juli 2019	Hotel Santika Garut	50	Tri Kusuma AP, S.Gz., M.Sc
8	Narasumber Antikorupsi di SMAN 3 Bandarlampung	15-17 Juli 2019	SMAN 3 Bandarlampung	105	Noor Achmad Aziz (3 Kelas)
				35	Gadrianto
				105	Syamsul Hidayat (3 kelas)
				70	Yulizar Komala Saniyati (2 kelas)
				70	Vonita (2 Kelas)
9	Narasumber Antikorupsi di KPPN Surakarta	17 Juli 2019	KPPN Surakarta	200	Drs. Kunto Nugroho, M.Si
10	Narasumber Antikorupsi di SMP Tara Salvia Bintaro	18 Juli 2019	SMP Tara Salvia	157	Bambang Winandar
					Subagio
11	Narasumber Antikorupsi di STKIP Muhammadiyah Kotabumi Lampung	25 Juli 2019	STKIP Kotabumi	150	Noor Achmad Aziz & Gadrianto
12	Narasumber Antikorupsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon	25 Juli 2019	Hotel Marina Ambon	450	Saleh Ramelan
13	Narasumber Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	5 Agus 2019	Auditorium GBH Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	1005	Tarman Budiarto
14	Narasumber Saya Anak Antikorupsi (SAAK) Makassar	30 Agus 2019	LPMP Sulsel Makassar	70	Tim #obatManjur
15	Narasumber Antikorupsi di STIKes Dr. Sismadi Jakarta	29 Agus 2019	STIKes Dr.Sismadi	80	Mohammad Ridwan Affan, SH
16	Narasumber Antikorupsi di FIDIKOM UIN Jakarta	28 Agus 2019	FIDIKOM UIN Jakarta	600	Mohammad Ridwan Affan, SH
17	Narasumber Antikorupsi untuk DPDSP PT. Bank BNI Wilayah Semarang	14 Sept 2019	Kayu Arum Hotel Salatiga	100	Drs. Kunto Nugroho, M.Si
18	Narasumber Pelatihan Budaya Anti Korupsi Kementerian Koperasi & UKM	10 Okt 2019	Hotel Amaroossa Bandung	25	M. Yahya Arwiyah
19	Narasumber Sosialisasi Antikorupsi JUMBARA PMR DKI Jakarta	16 Okt 2019	Buperta Cibubur	144	Suci Raharjo
20	Narasumber Pelatihan Pendidikan Antikorupsi Disdik Banjarbaru	21-Nov-19	Aula Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel	100	Rofiah, S.Si, M.Si
21	Narasumber CAMP DEMOKRASI dengan Tema PILKADA BERINTEGRITAS DAN ANTI POLITIK UANG yang diselenggarakan KOPEL Indonesia	8 Des 2019	Kampung Batulapisi, Malino, Kab. Gowa, Sulsel	300	Januar
	TOTAL PESERTA TERPAPAR ANTIKORUPSI			**4281**	**21 orang Penyuluh**

Narasumber Antikorupsi di SMP Tara Salvia Bintaro, 18 Juli 2019

Pelantikan Forum KomPAK Regional Jawa tengah, 2 Mei 2019

Narasumber Kuliah Umum Antikorupsi dalam kegiatan Milad HMI Cabang Ciami, 6 Februari 2019

Data Pemenuhan Narasumber Sosialisasi Antikorupsi

Tahun 2019

Dikyanmas KPK menerima **Permintaan Narasumber** 1.131 undangan kegiatan dan **dipenuhi oleh Pegawai KPK** sebanyak 1.056 kegiatan

Tahun 2020

Dikyanmas KPK menerima **Permintaan Narasumber** 461 undangan kegiatan dan **dipenuhi oleh Pegawai KPK** sebanyak 390 Kegiatan

Materi Kampanye Antikorupsi

Konten atau materi kampanye berupa materi cetak, infografis, PSA TV dan Radio

94 materi

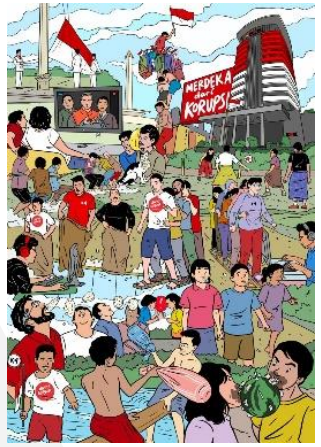

1. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
2. E-poster antikorupsi
3. Wall sticker
4. Perangkat sosialisasi antikorupsi (pin, gantungan kunci, sticker, zipper pouch, ballpoint, blocknotes, tas spunbond)
5. Buku-buku antikorupsi
6. Boardgames dan kartu permainan
7. PSA audio
8. Logo
9. Motion graphics
10. Poster kegiatan
11. Infografis

ACFFest 2020

PERANGKAT SOSIALISASI ANTIKORUPSI

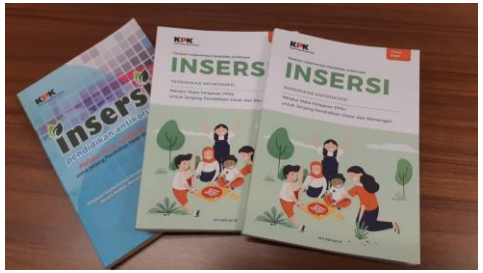

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
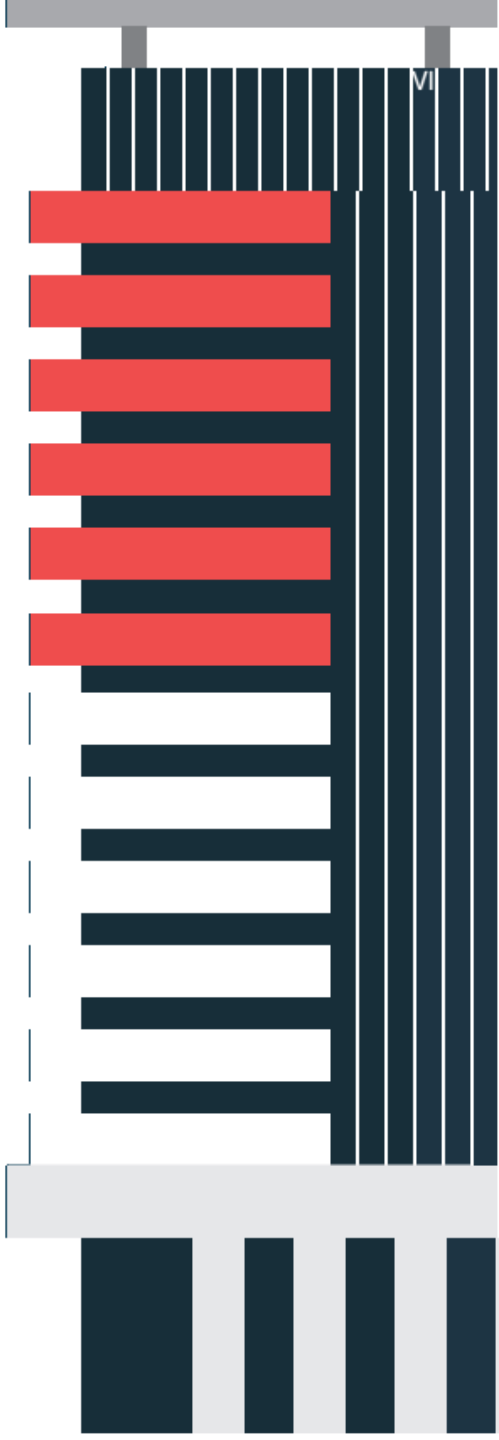
TERIMA KASIH